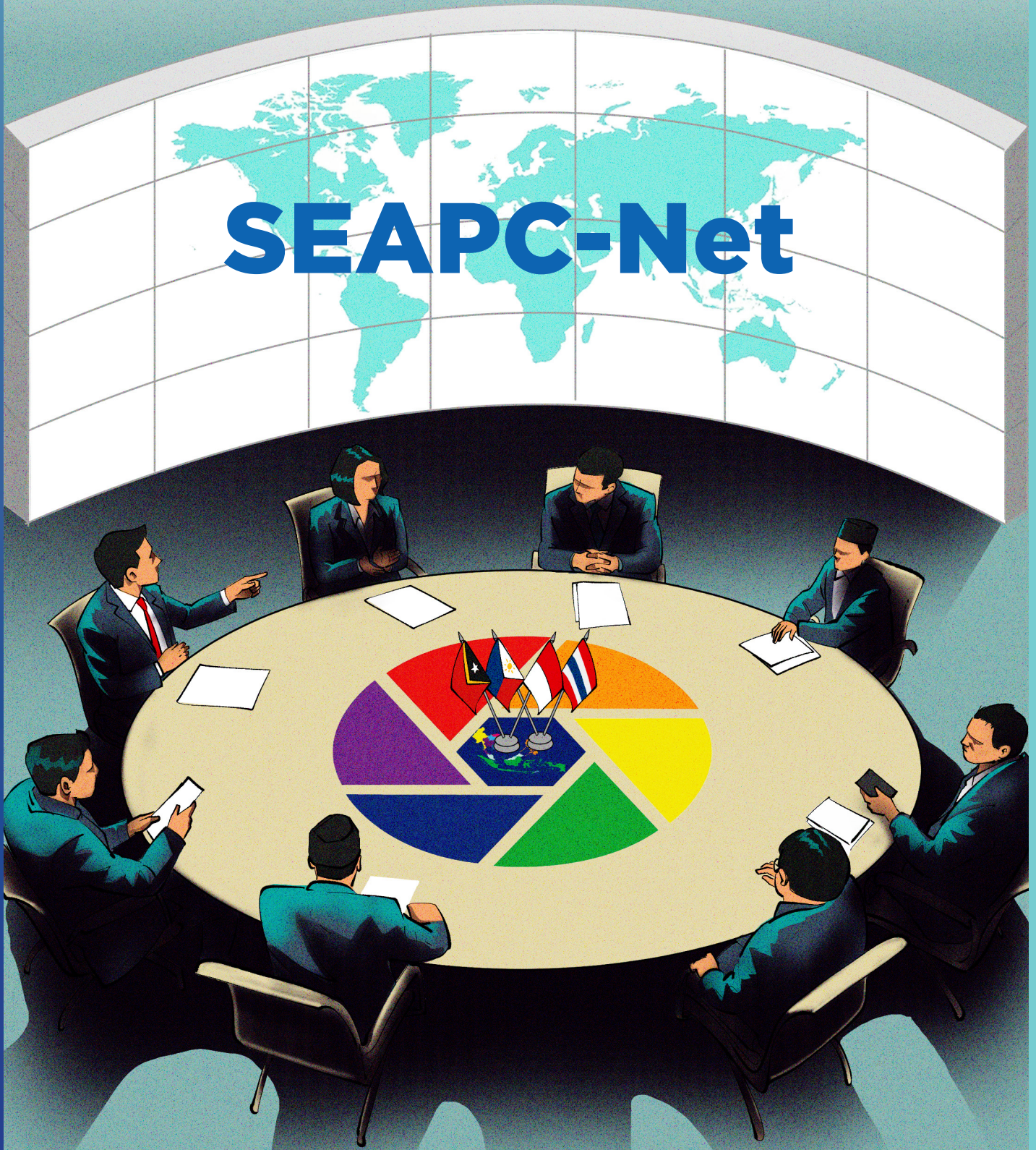


DEWANPERS

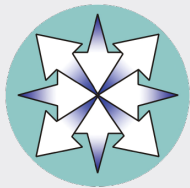
ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

SEAPC-Net



REDAKSIONAL



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto,
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal,
Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp: 021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers

Twitter: @dewanpers

Instagram: @officialdewanpers

Youtube: Dewan Pers Official

Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF
dapat diunduh dari website
secara gratis.

DAFTAR ISI

04. LAPORAN UTAMA

Menggalang Solidaritas ASEAN

03. Kabar Kebon Sirih

16. Teropong

18. Grafik

19. Lintas Berita

24. Galeri



12. Opini

Oleh: Asep Setiawan

MEMPROMOSIKAN KEMERDEKAAN PERS

Iklim kemerdekaan pers dan penguatan jurnalisme berkualitas selayaknya tidak hanya berhenti di sebuah negeri, melainkan juga harus dipromosikan di kawasan hingga wilayah global. Oleh karena itu setiap upaya mendorong penguatan kemerdekaan pers dan praktik jurnalisme berkualitas pada akhirnya butuh solidarisme dan gerakan bersama-sama. Seperti yang ditunjukkan oleh empat lembaga Dewan Pers di kawasan Asia Tenggara (ASEAN): Indonesia, Timor Leste, Thailand, dan Myanmar, yang bersepakat membentuk forum jaringan Dewan Pers ASEAN yang diberi nama South East Asia Press Council-Net (SEAPC-Net).

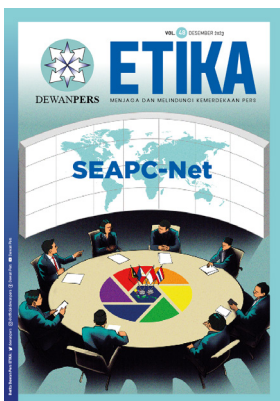
Tujuan SEAPC-Net adalah untuk mempromosikan kemerdekaan pers melalui pengaturan diri dan penghormatan terhadap kode etik media di negara masing-masing. Di samping itu juga untuk meningkatkan kerja sama antar-Dewan Pers atau organisasi serupa di Asia Tenggara. Inisiatif regional dan global memang kini semakin ditingkatkan oleh Dewan Pers, guna memberi kontribusi pada pengembangan praktik kemerdekaan pers secara internasional. Sekaligus ini mempromosikan praktik kemerdekaan pers di Indonesia itu sendiri.

Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia menaruh harapan besar agar SEAPC-Net kelak terus berkembang, seiring semakin meluasnya praktik kemerdekaan pers di negara-negara kawasan. Karena bagaimana pun, praktik kemerdekaan pers akan menjadi barometer kemajuan kehidupan pers di sebuah negara.

Keterlibatan Dewan Pers dalam SEAPC-Net dan dinamika dalam organisasi tersebut, kami hadirkan sebagai Laporan Utama buletin ETIKA edisi Desember 2023. Laporan ini didukung pula oleh tulisan OPINI dengan tema serupa dari salah satu anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal SEAPC-Net.

Sebagaimana biasa, pembaca, Anda juga akan dapat menikmati tulisan-tulisan khas kami pada rubrik Teropong yang kali ini menyoroti pengaduan dari tokoh-tokoh penting sepanjang 2023, serta artikel lain dan bidikan lensa aktivitas Dewan Pers sepanjang Desember 2023.

Selamat menikmati sajian ETIKA edisi ini, pembaca. Jangan pernah lelah mendukung iklim kemerdekaan pers di negeri kita tercinta. Salam kemerdekaan pers. Tabik! ●



Vol 47 - Desember 2023

Asmono Wikan

Pemimpin Redaksi

Menggalang Solidaritas ASEAN



WALNYA Dewan Pers dari empat negara --Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste-- bertemu di Dili, Timor Leste, pada 2017. Keempatnya mengakui peran penting Dewan Pers atau lembaga serupa dalam soal media keberlanjutan, hak memperoleh informasi, pencemaran nama baik di media, serta isu disinformasi. Mereka menyadari perlunya lembaga yang melindungi sekaligus mendorong media untuk bisa menyampaikan informasi secara independen.

Pertemuan di Dili itu pun berlanjut di Bangkok. Pada 24 September 2019, Dewan Pers keempat negara itu bahkan membuat deklarasi. Mereka menyepakati pembentukan jaringan Dewan Pers Asia Tenggara yang kemudian mereka namakan South East Asia Press Council-Net atau disingkat SEAPC-Net.

Sebagai bentuk keseriusan untuk menggalang solidaritas dan persaudaraan pers kawasan Asia Tenggara, maka digelar pertemuan pada 4 Desember 2019 di Denpasar, Bali. Dewan Pers empat negara itu menjadi pelopor berdirinya SEAPC-Net. Masih terbatasnya jumlah keanggotaan itu lantaran belum adanya Dewan Pers di negara kawasan ASEAN lainnya. Peserta yang hadir dari negara lain hanya berstatus sebagai peninjau.

Ada dua hal penting yang dirumuskan dalam pertemuan di Bali tersebut, yakni tujuan pembentukan jaringan dan membuat kegiatan bersama untuk meningkatkan profesionalisme pers. Pertama tentang tujuan jaringan SEAPC-Net. Tujuan pembuatan jaringan itu (a) untuk



mempromosikan kemerdekaan pers melalui pengaturan yang mandiri serta penghormatan terhadap kode etik pers di wilayah negara masing-masing. Tujuan berikutnya (b) adalah meningkatkan kerja sama antar-Dewan Pers atau organisasi serupa di setiap negara Asia Tenggara.

Kedua adalah isu tentang kegiatan bersama yang akan menjadi prioritas program SEAPC-Net. Dua kegiatan utamanya adalah (1) meningkatkan standar profesionalisme jurnalis di kawasan melalui seminar, pelatihan, serta program magang antarnegara anggota. Kemudian, (2) SEAPC-Net akan mendorong inisiatif negara lain di Kawasan ASEAN untuk membentuk Dewan Pers (*Press Council*) atau badan pengaturan mandiri yang serupa.

Keputusan lain yang tidak kalah penting yang juga lahir dari rahim Deklarasi Bali dalam sidang umum SEAPC-Net adalah terbentuknya kepengurusan baru. Para wakil pers dari empat negara itu sepakat menetapkan Prof Mohammad NUH sebagai ketua dengan wakilnya U Ohn Kyaing dari Myanmar. Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, ditetapkan sebagai sekretaris jenderal dengan empat anggota dewan direktur, yakni Agus Sudibyso, Kyaw Swa Min (Myanmar), Chavarong Limpattamapanee (Thailand), serta Virgilio da Silva Guiterres (Timor Leste).


Dalam anggaran dasar SEAPC-Net diatur juga tentang masa kepengurusan. Mereka sepakat kepengurusan akan dijalankan secara bergilir dalam periode dua tahunan. Sedangkan kedudukan sekretariat secara otoma-

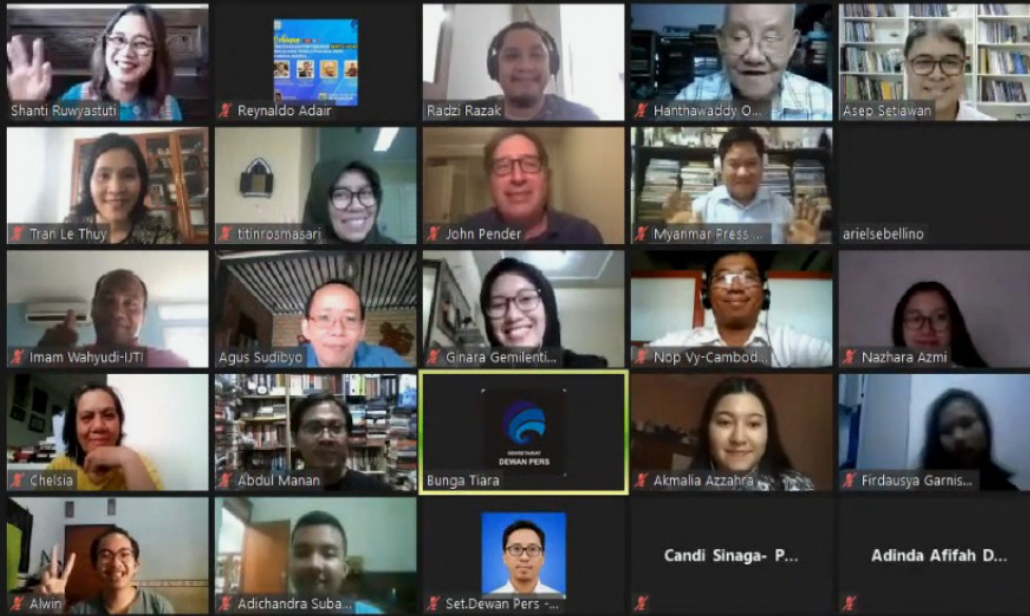


Ada dua hal penting yang dirumuskan dalam pertemuan di Bali, yakni tujuan pembentukan jaringan dan membuat kegiatan bersama untuk meningkatkan profesionalisme pers.

15:32:13 WIB ip



 Rapat sidang umum perdana Southeast Asian Press Council Network (Seapc-Net) pada Rabu (4/12/2019) di Bali. (FOTO: DEWAN PERS)



Webinar Southeast Asia Journalism : In New Normal Era, The Need For Webinar Southe



@Dewanpers



Southeast Asian Press Council Network (Seapc-Net) menggelar Seminar dengan tema "Southeast Asia Journalism : In New Normal Era, The Need for Media Partnership" pada Kamis (17/9/2020) secara daring. (FOTO: DEWAN PERS)

tis akan mengikuti keberadaan ketua terpilih.

Covid-19

Sangat disayangkan, kepengurusan SEAPC-Net tidak bisa menjalankan kegiatan dengan baik.

Tak lama pascapembentukan SEAPC-Net, beberapa hambatan datang menghadang tanpa bisa terelakkan. Tindak lanjut program seakan berhenti atau hanya bergerak di tempat. Merembaknya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 yang berlangsung hampir tiga tahun dan melanda pada hampir semua negaralah yang menjadi penyebab utamanya.

Selama memimpin SEAPC-Net, Dewan Pers praktis hanya menyelenggarakan beberapa kegiatan, antara lain pernyataan bersama SEAPC-Net, pada Mei 2020, dalam memberikan dukungan moral bagi pemerintah, pers, maupun pemangku kepentingan lain yang telah bahu-membahu dalam menghadapi pandemi Covid-19. SEAPC-Net mengakui upaya pemerintah Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste dalam mengatasi pandemi di wilayah masing-masing.

SEAPC-Net mengapresiasi seluruh kerja keras para petugas kesehatan dalam upayanya membendung pandemi ini. Pelayanan mereka tidak akan luput

dari perhatian. SEAPC-Net mengapresiasi pula seluruh elemen pers yang terus meliput dan memberitakan perkembangan terkini pandemi Covid-19 sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam hal membangun kesadaran kolektif untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami percaya, bahwa semangat kesukarelaan dan koordinasi adalah kunci bagi kita. Dengan cara itu akan bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan lebih cepat,” demikian antara lain bunyi pernyataan SEAPC-Net.

Selain itu, SEAPC-Net juga mengadakan webinar daring untuk jurnalis di kawasan Asia Tenggara, dengan tema “Kebutuhan Kemitraan Media pada Kondisi Normal Baru”. Webinar itu bertujuan merespons perkembangan politik di kawasan ASEAN. SEAPC-Net mengeluarkan pernyataan bersama pada 12

Maret 2021 untuk mendukung kemerdekaan pers di Myanmar.

Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembatasan masyarakat sipil, jurnalis, dan pekerja media di Myanmar. Mereka bersimpati dan berharap dapat terjaminnya lingkungan yang memungkinkan kebebasan media dan keamanan jurnalis untuk memberikan informasi kepada publik tanpa penangkapan atau intimidasi. SEAPC-Net menegaskan kembali posisinya dalam menjaga solidaritas dan kerja sama komunitas pers di Asia Tenggara dalam mewujudkan kebebasan pers di kawasan.

Kegiatan ketiga yang digelar SEAPC-Net adalah seminar internasional tentang potensi kolaborasi media dalam ekosistem digital di Asia Tenggara, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021 secara virtual melalui zoom. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk

(Dari kiri) Wakil Ketua Dewan Pers Myanmar, Ohn Maung; Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu; Ketua Dewan Pers Timor Leste, Otelio Ote; Ketua Dewan Pers Thailand, Chavarong Limpattamapane dalam Rapat sidang umum Kedua Southeast Asian Press Council Network (Seapc-Net) pada Rabu (29/12/2023) di Bali.
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

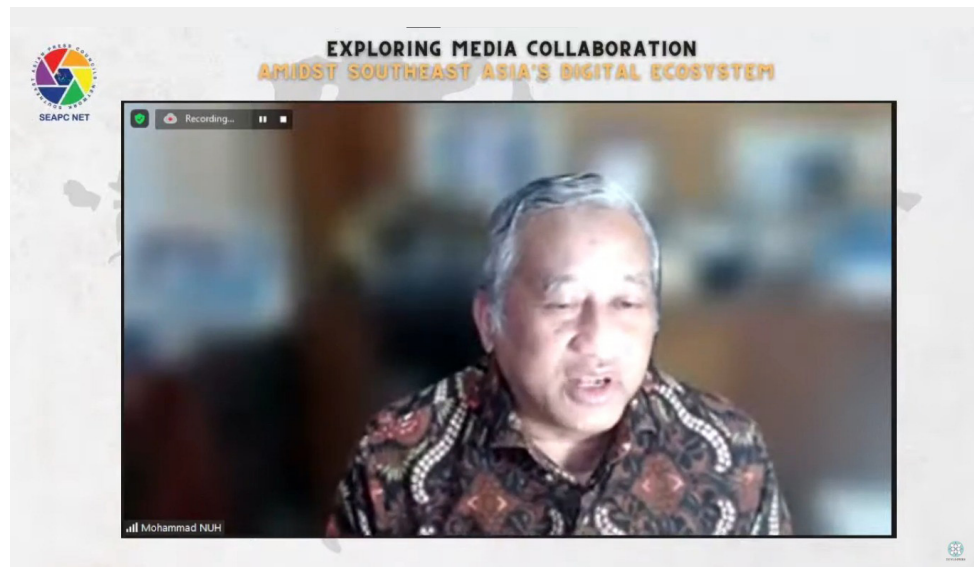


1) membahas berbagai tantangan ekosistem digital bagi media masa di Asia Tenggara, 2) bertukar pikiran tentang bagaimana pers di kawasan ini berhubungan dengan ekosistem digital, 3) membahas model kolaborasi media di Asia Tenggara dalam menghadapi ekosistem digital.

Seharusnya saat itu telah dilakukan pergantian kepengurusan, namun karena beberapa pertimbangan para anggota dan kondisi Covid-19 yang belum sepenuhnya reda, mekanisme pergantian kepengurusan belum bisa dilakukan. Pada saat ini, Dewan Pers Republik Indonesia kembali membuka diskusi dengan seluruh anggota dan pemangku kepentingan untuk membahas tindak lanjut program-program bersama yang bisa dilaksanakan ke depan, sekaligus mekanisme pergantian kepengurusan oleh anggota SEAPC-Net oleh anggota yang lain

Barulah pada 29 November 2023 di Denpasar, Bali, derap langkah SEAPC-Net mulai bisa ditata kembali. Sidang umum pun digelar dengan kehadiran empat negara pelopor. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, mengatakan pemilihan waktu dan lokasi pertemuan ini mengikuti usulan dan kesepakatan dalam rapat daring yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2023.

“Salah satu kesimpulan utama dari pertemuan tanggal 25 Oktober ini adalah menegaskan kembali, bahwa kesepakatan mengenai pentingnya pembentukan SEAPC-NET muncul dalam konteks lanskap media Asia Tenggara yang dinamis. Hal itu ditandai dengan mening-



Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 Mohammad NUH membuka seminar dengan tema “Exploring Media Collaboration Amidst Southeast Asia’s Digital Ecosystem” pada Jumat (6/8/2021) secara daring. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

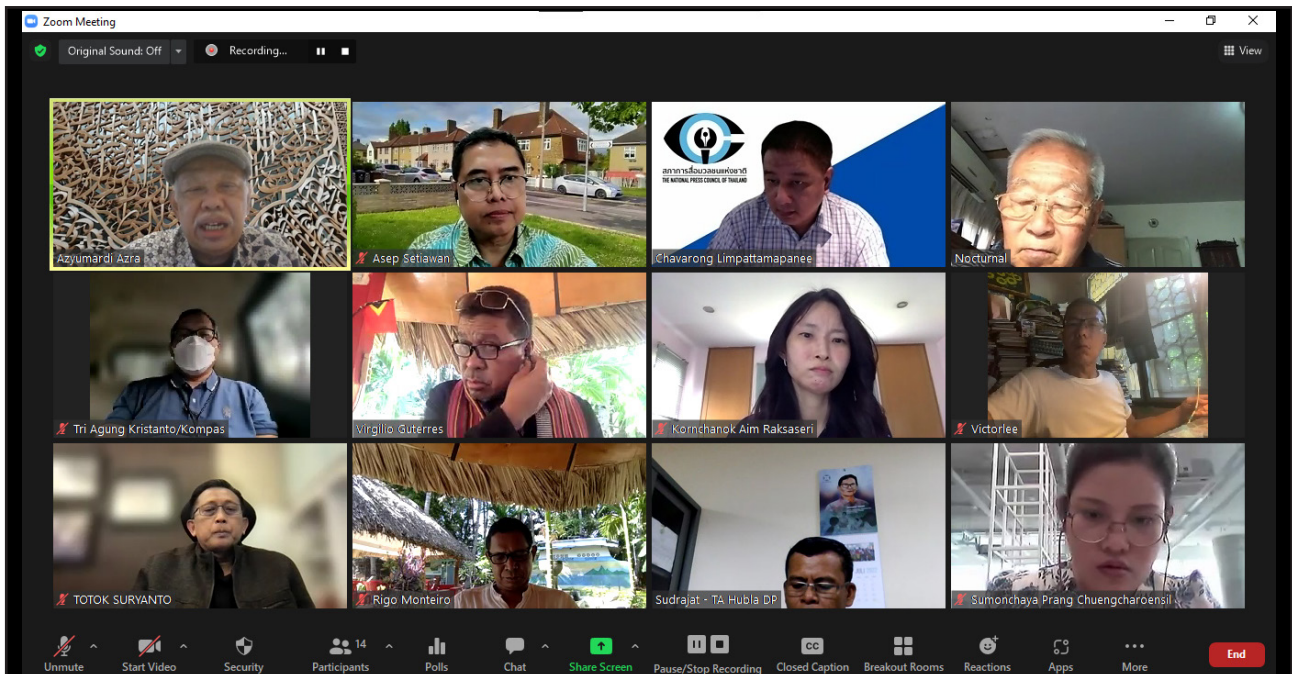


Kemerdekaan pers masih menjadi isu regional dan global yang menuntut seluruh komunitas pers untuk berbenah diri.

katnya kompleksitas, keragaman, yang ternyata menjadi tantangan bagi para pemimpin media di Asia Tenggara. Ini sebuah isu yang relevan untuk kita bahas lebih mendalam pada pertemuan kali ini,” tuturnya.

Penting pula tanggapan bersama terhadap masalah-masalah umum yang dihadapi oleh Dewan Pers di seluruh kawasan, ujar Ninik, antara lain mempromosikan jurnalisme profesional dan perusahaan pers profesional. Tak kalah penting pula perlunya penelitian akademis untuk mengembangkan praktik terbaik dalam jurnalisme.

Ia berharap SEAPC-Net menjadi motor penggerak terciptanya lingkungan regional yang mengedepankan integritas media dan perilaku etis serta tata kelola demokratis yang memungkinkan kebebasan pers. “Perlu dialog dengan mengidentifikasi isu-isu jurnalisme regional, membahas pengembangan strategi untuk mengatasinya dengan pelbagai tantangannya, struktur tata kelola, proses pengambilan keputusan,



perluasan keanggotaan ke wilayah regional, dan dampak upaya kolaboratif terhadap praktik jurnalistik di negara tersebut,” paparnya.

Timor Leste

Agenda majelis umum SEAPC-Net juga mencakup penyerahan kepemimpinan Indonesia kepada anggota lainnya. Para peserta juga mendorong perluasan keanggotaan SEAPC-Net. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan situasi di kawasan, antara lain di Laos dan Kamboja. Adapun di Filipina hanya ada Dewan Pers provinsi sehingga perlu dibicarakan kembali jika ingin merekrut mereka menjadi anggota SEAPC-Net.

Sementara itu Otelio Ote, ketua Dewan Pers Timor Leste yang ditetapkan sebagai pemimpin baru SEAPC-Net menuturkan, kemerdekaan pers masih menjadi isu regional dan global yang menuntut seluruh komunitas pers untuk berbenah diri. “Sebagai negara



Southeast Asian Press Council Network (Seapc-Net) menggelar rapat secara daring dalam rangka memperkenalkan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 yang terpilih pada Rabu (4/12/2019).
(FOTO: DEWAN PERS)



Kami percaya, bahwa semangat kesukarelaan dan koordinasi adalah kunci bagi kita, demikian sebagian isi pernyataan bersama SEAPC-Net.

baru, di tahun ke-21 kemerdekaan, Republik Demokratik Timor Leste telah bekerja keras menyesuaikan diri dengan kemajuan pers di dunia dan kawasan,” ungkap Ote.

Ia bersyukur konstitusi di negaranya memiliki dua pasal, yaitu pasal 40 dan 41, yang menjamin kemerdekaan pers. Berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Sosial Nomor 5 Tahun 2014, dibentuklah Dewan Pers yang saat ini dipimpin Ote.

“Kami hadir di Sidang Umum SEAPC-Net, sebuah jaringan yang dibentuk beberapa tahun lalu oleh Dewan Pers empat negara. Kami menegaskan kembali komitmen serta peran penting dalam menjaga kemerdekaan pers dan memperkuat solidaritas di Kawasan,” kata dia.

Lantaran sudah lama tidak bertemu, semenjak Covid 2019, Ote pun mempertanyakan relevansi visi dan misi SEAPC-Net. “Apakah masih pantas keberadaan SEAPC-Net? Apakah peran kita masih penting di kawasan ASEAN? Apakah keanggo-

taan SEAPC-Net dibatasi pada empat negara atau dapat diperluas ke seluruh negara anggota ASEAN? Apa yang harus kita lakukan setelah sidang umum ini?" urainya.

Seolah menjawab apa yang ditanyakan sendiri, Ote mengutarakan, bahwa peran SEAPC-Net di ASEAN saat ini dan nanti sangatlah penting dan krusial. Melalui jaringan inilah komunitas pers ASEAN bisa berkomunikasi, mengaktualisasikan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi pers dan kemerdekaan pers di negara masing-masing, serta mencari solusi bersama untuk mewujudkan pers yang kuat di kawasan dan di dunia. Ia mendukung sepenuhnya perluasan keanggotaan SEAPC-Net di ASEAN.

Timor Leste yang peringkat kebebasan persnya tertinggi di ASEAN dan masuk urutan 10 dunia merasa prihatin dengan situasi dan kondisi pers di Myanmar. SEAPC-Net perlu mengadvokasi seluruh elite politik di Myanmar untuk mengembalikan kondisi pers menjadi independen sebagai mata, telinga, dan mulut seluruh lapisan masyarakat.

"Kita perlu bekerja sama, membangun kebebasan pers yang demokratis serta meningkatkan kapasitas profesional jurnalis dan pekerja media di kawasan ASEAN. Mari menyatukan persepsi untuk menghasilkan konstitusi dan gagasan SEAPC-Net yang relevan untuk mewujudkan komitmen bersama menuju jaringan SEAPC-Net yang kuat dan proaktif," kata Ote.

Sedangkan mantan Sekjen SEAPC-Net yang juga anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, menjelaskan keberadaan lembaga ini merupa-



A Ketua Dewan pers Timor Leste, Otelio Ote dalam Rapat sidang umum kedua *Southeast Asian Press Council Network (Seapc-Net)* pada Rabu (29/12/2023) di Bali.
(FOTO: DEWAN PERS)

kan wujud kepedulian Dewan Pers di kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan kemerdekaan pers di wilayah ini. Oleh karena itulah, tujuan SEAPC-Net adalah mempromosikan kemerdekaan pers melalui pengaturan diri dan penghormatan terhadap kode etik media di wilayah masing-masing. Selain itu, lembaga tersebut berupaya serta meningkatkan kerja sama antar-Dewan Pers atau organisasi serupa di Asia Tenggara.

Menurut Asep, meski sekarang ini hanya empat anggota SEAPC-Net, namun para pimpinannya membuka pintu keanggotaan bagi negara lain sekalipun belum memiliki Dewan Pers di negaranya. "Kami mengajak organisasi media di Asia Tenggara untuk menjadi *associate members*. Keanggotaan ini sifatnya tidak tetap dan memang tidak memiliki posisi untuk menjadi anggota tetap SEAPC-Net," kata Asep.

Ia mengutarakan, SEAPC-Net mengingatkan, supaya para jurnalis dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada kode etik yang berlaku di negaranya serta kaidah lain yang ada. Profesionalisme pers menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari di era keterbukaan ini.

Pada pihak lain, ungkapnya, kerja sama komunitas pers di kawasan regional juga tidak kalah penting. Persoalan yang dihadapi pers dalam kancah internasional akan lebih bisa menemukan jalan keluar jika ada kerja sama kuat di antara lembaga-lembaga yang menaungi pers di kawasan tersebut.

Asep juga berharap dengan mulai sirnanya pandemi Covid-19 dan terpilihnya kepengurusan baru di SEAPC-Net, maka berbagai program untuk menggalang solidaritas pers ASEAN lebih bisa dilaksanakan. Dewan Pers dari tiga negara lain siap memberikan dukungan dan bantuan demi berjalannya kepengurusan SEAPC-Net dalam periode dua tahun mendatang. ● **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**

Turut Wujudkan SEAPC-Net

Oleh
Asep Setiawan *)



Penamaan Southeast Asia Press Councils Network (SEAPC_net) merupakan hasil dialog empat negara yakni Indonesia, Myanmar, Thailand dan Timor Leste di Denpasar, Bali tanggal 4 Desember. Hari itulah pengukuhan SEAPC-Net dimana Indonesia turut andil membangun jaringan Dewan Pers di Asia Tenggara sejak kepengurusan Dewan Pers sebelumnya setidaknya dari Ketua Dewan Pers 2016-2019 Stanley.

SEAPC-Net yang sampai sekarang beranggotakan 4 negara ini merupakan wujud kepedulian Dewan Pers di Kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan kemerdekaan pers di daerah ini. Oleh karena itulah maka tujuan SEAPC-Net adalah



Pendiri SEAPC-Net dari Kiri ke kanan Virgilio da Silva Guterres (Timor-Leste), Chavarong Limpattamapanee (Thailand), Mohamad Nuh (Indonesia dan U Ohn Kyaing (Timor Leste)

Mempromosikan kemerdekaan pers melalui pengaturan diri dan penghormatan terhadap Kode Etik Media di wilayah ini, meningkatkan kerja sama antara Dewan Pers atau organisasi serupa di Asia Tenggara.

Demikian juga kegiatan SEAPC-Net adalah a) Meningkatkan standar profesional wartawan di kawasan melalui seminar, pelatihan, program magang antar negara anggota. b) Mendorong inisiatif negara-negara lain di kawasan ini untuk membentuk Dewan Pers atau badan pengatur mandiri yang serupa.

Sebagai langkah awal setelah mengukuhkan Konstitusi SEAPC-Net, rapat empat negara memutuskan agar Ketua Dewan Pers Mohamad Nuh menjadi Chairperson SEAPC-Net untuk dua tahun sejak Desember 2019. Sedangkan Asep Setiawan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal SEAPC-Net yang diputuskan berkantor di Dewan Pers di Jakarta. Formasi SEAPC-Net ini ditambah dengan para direktur yakni Agus Sudibyo dari Indonesia, Kyaw Swa Min (Myanmar),

Chavarong Limpattamapanee (Thailand) dan Virgilio da Silva Guterres (Timor-Leste)

DIALOG DAN PERTEMUAN

Sejak dikukuhkan Desember 2019, SEAPC-Net menghadapi pandemi COVID-19 mulai dari 2020 sampai setidaknya 2022. Keketuaan Indonesia juga diperpanjang mengingat kondisi Myanmar. Berbagai kegiatan yang dilakukan selama COVID-19 lebih bersifat virtual melalui dialog dan kegiatan lainnya.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi pandemi, SEAPC-Net tanggal 6 Mei 2020 mengeluarkan rilis baru. Di dalam rilis ini antara lain dikatakan bahwa SEAPC-Net mengapresiasi seluruh elemen pers yang terus meliput dan memberitakan perkembangan pandemi COVID-19 sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, terutama dalam hal membangun kesadaran kolektif untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.



Indonesia dengan kata lain telah meletakkan dasar penting dalam perkembangan pers di Kawasan khususnya dalam menjalin kerjasama Dewan Pers atau lembaga sejenis di Asia Tenggara.

Selanjutnya juga disebut bahwa SEAPC-Net mengingatkan kembali kepada redaksi media untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam kode etik jurnalis serta menjaga protokol kesehatan dan keselamatan pekerja pers dalam memberitakan perkembangan COVID-19. Akhirnya SEAPC-Net mendorong pemerintah Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timor-Leste untuk memperkuat komunitas pers di masa pandemi COVID-19 karena peran yang dimiliki oleh pers, yaitu mempercepat pemulihan publik dengan memberikan informasi yang solid.

Selain menyampaikan Kegiatan yang sudah direncanakan pada awal tahun 2022 adalah mengajak organisasi media dan yang berkaitan di Asia Tenggara untuk menjadi apa yang disebut associate members. Keanggotaan ini sifatnya tidak tetap dan tidak memiliki posisi untuk menjadi anggota tetap SEAPC-Net.

Tanggal 17 September 2020 di tengah Pandemi COVID-19, SEAPC-Net menyelenggarakan webinar *Southeast Asia Journalism: In New Normal Era: The Need for Media Partnership*. Webinar ini memandang bahwa di tengah COVID-19 daya tahan media dapat dilakukan

juga melalui kolaborasi antara negara dalam membangun jurnalisme di Kawasan Asia Tenggara. Media di setiap negara di Asia Tenggara mengalami tantangan besar karena sulitnya peliputan karena pembatasan kegiatan sosial dan juga menurunnya iklan baik dari pemerintah maupun swasta.

Dalam rangka mempromosikan SEAPC-Net ke negara-negara di Asia Tenggara, telah terselenggarakan dialog dengan Cambodia Journalist Association 2 Desember 2020. Dari dialog virtual ini muncul gagasan pentingnya organisasi media dan profesi wartawan seperti di Kamboja ikut bergabung kedalam SEAPC-Net.

Tanggal 12 Maret 2021 sebagai bentuk kepedulian terhadap kemerdekaan pers di Kawasan, SEAPC-Net mengeluarkan rilis tentang situasi pers di Myanmar. Dalam rilis ini disebutkan bahwa SEAPC-Net menyatakan keprihatinannya tentang pembatasan terhadap masyarakat sipil, jurnalis-jurnalis, dan pekerja media di Myanmar. Lalu dinyatakan bahwa SEAPC-Net berharap bahwa lingkungan yang mendukung kebebasan media dan keselamatan dan keselamatan jurnalis untuk memberikan informasi kepada publik tanpa adanya penangkapan atau intimidasi akan terjamin.

Selain itu, SEAPC-Net ingin menyampaikan simpati kepada Dewan Pers Myanmar, berharap bahwa dalam situasi politik yang baru ini, Dewan Pers dapat terus menjaga universal yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan informasi. SEAPC-Net menegaskan kembali dukungannya yang kuat untuk Dewan Pers Myanmar dalam mendukung kebebasan pers di negara tersebut. SEAPC-Net menegaskan kembali posisinya untuk menjaga solidaritas dan kerjasama di antara komunitas pers di Asia Tenggara dalam membangun kebebasan pers di wilayah ini.

Dan kegiatan SEAPC-Net di bawah kepemimpinan Indonesia adalah juga menyelenggarakan webinar dengan topik *Exploring Media Collaboration Amidst Southeast Asia's Digital Ecosystem* 6 Agustus 2021. Dalam seminar ini disinggung bahwa perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar pada cara kerja media dan model bisnis media di Asia Tenggara. Platform digital telah mendorong media massa tradisional untuk



(Dari kiri) Wakil Ketua Dewan Pers Myanmar, Ohn Maung; Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu; Ketua Dewan Pers Timor Leste, Otelio Ote; Ketua Dewan Pers Thailand, Chavarong Limpattamapanee dalam Rapat sidang umum Kedua Southeast Asian Press Council Network (Seapc-Net) pada Rabu (29/12/2023) di Bali. (FOTO: DEWAN PERS)

menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan lebih luas. Penyampaian konten media tidak lagi bergantung pada jaringan konvensional seperti media cetak melalui saluran langsung ke publik dan media elektronik melalui tradisional melalui saluran radio atau televisi saja. Semua konten media kini dapat diakses melalui platform digital dengan menggunakan komputer, smartphone, atau gawai lainnya. Webinar menghadirkan pembicara mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Kamboja.

Berbagai kegiatan di bawah kepemimpinan Indonesia itu menunjukkan kepedulian Indonesia dalam membangun kemerdekaan pers di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia dengan kata lain telah meletakkan dasar penting dalam perkembangan pers di Kawasan khususnya dalam menjalin kerjasama Dewan Pers atau lembaga sejenis di Asia Tenggara bahkan kedepan kerjasama dengan Dewan Pers di berbagai Kawasan.

TIMOR LESTE KETUA SEAPC-Net

Kepemimpinan SEAPC-Net yang tertunda dua tahun akhirnya disepakati dalam pertemuan di Bali untuk diserahkan ke Timor Leste. Sedangkan kepemimpinan Myanmar akan menunggu situasi kemerdekaan pers di negara ini setelah kudeta Februari 2021 situasi persnya tidak kondusif. Akhirnya 29 November 2023, wakil Dewan Pers empat negara berkumpul lagi dan menyerahkan keketuaan SEAPC-Net dari Indonesia kepada Dewan Pers Timor Leste.

Hadir dalam acara laporan SEAPC-Net selama empat tahun terakhir dan serah terima kepemimpinan di SEAPC-Net adalah Ketua Dewan Pers Myanmar U Ohn Maung, Ketua Dewan Pers Indonesia Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers Timor Leste Otelio Ote, Ketua Dewan Pers Thailand. Hadir pula delegasi dari empat negara termasuk dari Indonesia hadir Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, Yadi Hendriana dan Asep Setiawan. ●

*)Anggota Dewan Pers

Pengaduan dari Tokoh-Tokoh Penting di Tahun 2023



Dewan Pers, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, aktif menanggapi pengaduan masyarakat melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers (Komisi Pengaduan). Tugas komisi ini melibatkan penerimaan dan penyelesaian pengaduan terkait dengan berita dan perilaku wartawan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Selama tahun 2023, Komisi Pengaduan menerima sebanyak 813 kasus dari berbagai elemen masyarakat dengan beragam latar belakang. Pengaduan ini ada yang berasal dari lembaga pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat, seperti kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), bupati, wali kota, lurah, dan camat. Selain itu, terdapat pula pengaduan dari institusi TNI/Polri, lembaga pendidikan, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan pelaku usaha swasta.

Beberapa pengaduan ini disampaikan oleh pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya, menunjukkan adanya keterlibatan profesional dalam menanggapi

isu-isu terkait berita dan perilaku wartawan. Langkah-langkah yang diambil Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan menunjukkan komitmen Dewan Pers dalam menjaga etika dan kualitas pemberitaan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap pemberitaan atau perilaku wartawan.

Dari total 813 kasus pengaduan yang diterima, Dewan Pers berhasil menuntaskan 794 kasus atau 97.66%, menunjukkan tingkat efektivitas yang signifikan dalam menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, 19 kasus atau 2.34% masih berada dalam tahap penyelesaian dan diharapkan akan tuntas pada tahun 2024. Kasus yang terbanyak masuk pada bulan Mei dan Agustus, masing-masing mencapai 96 kasus dan 99 kasus, sementara jumlah terendah tercatat pada bulan Desember dengan 19 kasus. Lebih dari 90% dari total pengaduan terkait media siber, sementara sisanya ada hubungan dengan media cetak atau siaran televisi. Tidak ada pengaduan terhadap berita di platform radio. Pada tahun 2023, terdapat tren baru dengan adanya beberapa pengaduan yang



◀ Penyelesaian pengaduan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Erick Thohir dengan Tempo pada Senin (17/7/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

menyoroti konten dari platform media sosial resmi perusahaan pers, seperti YouTube dan Twitter.

Dari hasil evaluasi oleh Dewan Pers terhadap pengaduan yang diterima, pelanggaran paling umum dilakukan oleh media adalah terhadap pasal 1 dan 3 dalam Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran ini mencakup tidak berimbang, tidak proporsional, tidak ada uji informasi, tidak konfirmasi, dan mencampurkan fakta dan opini yang bersifat menghakimi. Selain itu, dalam pemberitaan yang diadukan, khususnya di media siber, sering melanggar ketentuan tentang verifikasi dan keseimbangan berita sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Peraturan ini menyatakan, bahwa pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi dan berita yang dapat merugikan pihak lain

memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Sedangkan dari penyelesaian pengaduan, dari 794 kasus yang diselesaikan, 62 (enam puluh dua) kasus diselesaikan melalui risalah penyelesaian, 45 (empat puluh lima) kasus melalui pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR), 644 (enam ratus empat puluh empat) kasus melalui surat, dan 40 (empat puluh) kasus disimpan sebagai arsip.

Salah satu pengaduan menarik yang mencuat di Dewan Pers adalah kasus yang diajukan oleh Ferdy Sambo terhadap media siber *herstory.co.id* pada awal tahun 2023. Dalam pengaduan tersebut, mantan Kabareskrim Mabes Polri, Ferdy Sambo, melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan terhadap empat berita yang diterbitkan oleh *herstory.co.id* terkait dengan pemberitaan tentang Putri Chandrawati.

Sebagai respons terhadap pengaduan ini, Komisi Pengaduan memanggil pihak yang bersengketa untuk mengikuti forum mediasi. Proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan risalah mediasi, mengakhiri sengketa tersebut dengan cara yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Keberhasilan penyelesaian kasus ini melalui mediasi menunjukkan efektivitas Komisi Pengaduan dalam menanggapi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan pemberitaan media siber.

Selain itu, ada pula pengaduan menarik yang dilayangkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, terhadap Tempo. Kasus ini unik karena melibatkan konten podcast channel Youtube Tempo. Pengaduan ini mencatat sejarah sebagai pengaduan pertama terkait *channel podcast* (siniar) yang disiarkan melalui media sosial Youtube yang masuk ke Dewan Pers. Inovasi dalam pemberitaan dan evolusi media baru menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh industri pers.

Dengan penanganan yang cermat dan profesional, Dewan Pers terus berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang adil dan proporsional. Sebagai garda terdepan dalam menegakkan etika jurnalistik, Dewan Pers berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas pemberitaan di Indonesia. • Reza Andreas

SURAT



7 surat
Surat Undangan Mediasi.

132 kasus
Surat Keputusan/
Penilaian akhir/Tanggapan/
Penyelesaian pengaduan.

PPR: 29 PPR

terhadap pekanbaru-
tribunnews.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 30 PPR

terhadap rakyat-
merdeka.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 31 PPR

terhadap
pantauriau.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 32 PPR

terhadap
pekanbaru.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 33 PPR

terhadap
jagariau.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 34 PPR

terhadap
cakaplah.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 35 PPR

terhadap
cakapriau.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 36 PPR

terhadap
riauposjawapos.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 37 PPR

terhadap
borgolnews.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 38 PPR

terhadap
kabarduri.net
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 39 PPR

terhadap
detikperjuangan.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 40 PPR

terhadap
nusaperdana.com
atas pengaduan
Khairul Umam

PPR: 41 PPR

terhadap
riaulantang.com
atas pengaduan
Elidanetti



Laporan
Kasus Pengaduan
November 2023

NOVEMBER

Risalah No 59

Moch Ojat Sudrajat dengan
Harian Banten Pos

Risalah No 60

Eko Suncaka dengan
gemalampung.com

Risalah No 61

Susyani Labuhanbatu
dengan madinainews.id

Risalah No 58

Yayasan Asram dengan
sorot.co



▲ Dewan Pers menggelar pertemuan dengan tim pemenang tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam rangka mengajak ketiga paslon capres-cawapres untuk menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers pada Rabu (17/12/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers Ajak Capres-Cawapres Deklarasikan Komitmen Kemerdekaan Pers

JAKARTA—Dewan Pers mengajak ketiga capres-cawapres untuk menyatakan komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers. Penyampaian deklarasi sebagai komitmen itu akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta.

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, mengutarakan hal itu di depan tim pemenang paslon di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Menurut Ninik deklarasi kemerdekaan pers ini bukanlah debat capres-cawapres. “Debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berakhir pada 4 Februari. Itu merupakan debat terakhir. Kami tidak ingin membuat masyarakat malah bingung jika masih ada debat lagi,” kata Ninik.

Menurut Ninik, masyarakat pers ingin ketiga capres-cawapres (Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3) bisa hadir dalam deklarasi itu. "Bila ada yang tidak bisa hadir, masyarakat tentu akan menafsirkan dan bisa memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers," paparnya.

Sedangkan Ketua Panitia Deklarasi Kemerdekaan Pers oleh Capres-Cawapres, Totok Suryanto, yang juga anggota Dewan Pers mengutarakan, pemilihan tanggal 7 Februari itu agar tidak mengganggu sisa masa kampanye ketiga pasangan calon. "Kami cuma minta waktu satu jam saja untuk ketiga pasangan calon. Kami yakin ketiga capres-cawapres tidak keberatan dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional. Panglima TNI dan kapolri juga memastikan untuk hadir," ujarnya. ●

Penanganan Kekerasan Terhadap Pers dalam Pemilu Diminta tak Lebih dari 24 Jam

JAKARTA—Dewan Pers berharap para jurnalis dan awak media mendapatkan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga dalam menggali data dan informasi untuk publik. Penegasan



Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, pada acara Dialog Pimpinan Lembaga: Mekanisme Respons Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Konteks Pemilu yang diselenggarakan Dewan Pers bekerja sama dengan UNESCO pada Senin (18/12/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

itu dikemukakan Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, pada acara Dialog Pimpinan Lembaga: Mekanisme Respons Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Konteks Pemilu yang diselenggarakan Dewan Pers bekerja sama dengan UNESCO.

Ninik menambahkan, semua pihak tentu tidak menginginkan jurnalis dan awak media mengalami intimidasi atau kekerasan dalam menjalankan tugas liputan pemilu. "Kalau ada kekerasan atau intimidasi pada jurnalis dan awak media saat liputan pemilu, penanganannya harus lebih cepat dari 24 jam," tutur Ninik, Senin (18/12) di Jakarta.

la juga mengajak semua pihak untuk memastikan tidak ada kekerasan terhadap wartawan. Sebaliknya, kata dia, kalau ada pemberitaan yang tidak patuh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), itu artinya memang ingin memanipulasi informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Asep Setiawan, dalam paparannya mengutarakan, pada survei terhadap 138 wartawan di 17 provinsi tiga bulan lalu ditemukan data beberapa hambatan terhadap wartawan. Sebanyak 36,9% mengaku pernah mendapat intimidasi atau ancaman terkait pemberitaan pemilu. Sekitar 32% tidak mengalami intimidasi atau ancaman. Sedangkan sisanya mengalami pelanggaran liputan (15,6%), kekerasan fisik (6,6%), perampasan alat liputan (4,1%), dan serangan digital (3,3%). ●



Revisi Kedua UU ITE Ancam Kemerdekaan Pers

JAKARTA--Revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disetujui bersama DPR dan pemerintah untuk disahkan menjadi UU pada 6 Desember 2023 lalu masih berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat. Revisi kedua atas UU tersebut juga tidak memberikan perubahan signifikan terhadap pasal-pasal yang selama ini menjadi ancaman kemerdekaan pers.

Dalam siaran persnya tanggal 8 Desember, Dewan Pers menyatakan, pasal-pasal yang dimaksud antara lain adalah Pasal 27A mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tuduhan/fitnah



Pasal-pasal itu secara tidak langsung dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam pers, yang pada akhirnya akan menciderai upaya mewujudkan negara demokratis.

dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian, ancaman lainnya datang dari Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang mengancam pelaku penyebaran pemberitahuan bohong dan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Setiap orang yang melanggar pasal-pasal itu bisa dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp1 miliar.

Pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan tersebut mengingatkan pada *haatzaai artikelen* dalam KUHP. Pasal-pasal karet produk kolonial tersebut bahkan dikuatkan dengan KUHP baru sebagai produk hukum nasional, yang sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 28 ayat (1) pada revisi kedua atas UU ITE berpotensi mengebiri pers karena karya jurnalistik yang didistribusikan menggunakan sarana teknologi dan informasi elektronik (di internet) terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sengketa, dapat dinilai oleh pihak tertentu sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian. Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat kepolisian dapat menahan setiap orang selama 120 hari, termasuk wartawan, atas dasar tuduhan melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam revisi kedua atas UU ITE ini. Pasal-pasal itu secara tidak langsung dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam pers, yang pada akhirnya akan menciderai upaya mewujudkan negara demokratis. ● **Arif Supriyono**



Kunjungan Diskominfo

Dewan Pers menerima kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Timika Papua pada Selasa (5/12/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto didampingi oleh Tenaga Ahli, Sudrajat serta staf Sekretariat Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





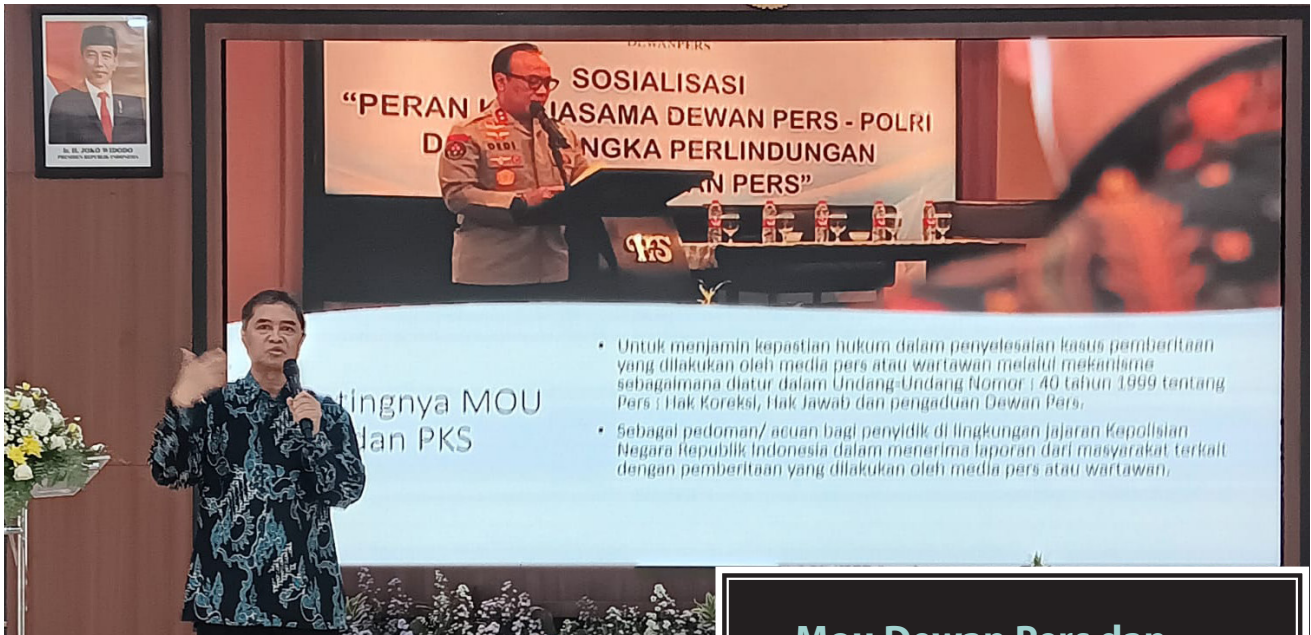
Kunjungan Dewan Pers ke Kantor LPSK

Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya bersama konstituen Dewan Pers melakukan kunjungan ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur pada Rabu (6/11).

Rombongan yang diterima langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, bersama Sekjen LPSK Noor Sidharta beserta tenaga ahli dari LPSK Rully novian dan Muhamad irfan. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





DEWAN PERS
SOSIALISASI
“PERAN KERJASAMA DEWAN PERS - POLRI
DALAM MELAKUKAKAN PENYIDIK DI LINGKUNGAN
PERLINDUNGAN DEWAN PERS”



- Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kasus pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers ; Hak Koreksi, Hak Jawab dan pengaduan Dewan Pers.
- Sebagai pedoman/ acuan bagi penyidik di lingkungan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan.



TINDAK LANJUT
ANEUP & KONSOLIDASI
KEHUMASAN
JAJARAN POLDA
JAWA TIMUR

Mou Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia

Dewan Pers mengadakan Sosialisasi Mou antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia pada Rabu (06/12/2023) di Polda Jawa Timur.

Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Bekasi, 24 - 25 November 2023



UKW Dewan Pers

Dewan Pers mengadakan Training of Trainer Uji Kompetensi Wartawan tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali, yaitu pada tanggal 24-25 November 2023 dan 11-12 Desember 2023 di Bekasi.

Ratusan penguji dari berbagai lembaga uji turut berpartisipasi dalam acara tersebut, yang bertujuan untuk menyegarkan pengetahuan terkait peraturan Standar Kompetensi Wartawan. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Dewan Pers bekerja sama dengan UNESCO menyelenggarakan diseminasi Mekanisme Respons Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Peliputan Pemilu. Acara tersebut berlangsung pada Rabu (20/12/2023) di Medan, Sumatera Utara, dan pada Kamis (21/12/2023) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Diseminasi mengenai Mekanisme tersebut bertujuan sebagai panduan teknis bagi perusahaan pers, organisasi pers, wartawan, dan Satuan Tugas Kekerasan terhadap Wartawan/Pers (disebut Satgas), yaitu tim ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Pers. Satgas ini terdiri dari Anggota Dewan Pers dan perwakilan organisasi pers dengan dukungan administratif dari Sekretariat Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





**Kunjungan
Kabupaten Tanah
Datar**

Dewan Pers menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Pada Jumat (1/12/2023) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto didampingi oleh Tenaga Ahli, Sudrajat dan Arif Supriyono beserta staf Sekretariat Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Peliputan Pemilu

Dewan Pers bekerja sama dengan UNESCO menyelenggarakan dialog pimpinan lembaga dengan tema “Mekanisme Respons Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Konteks Pemilu pada Senin (18/12/2023) di Jakarta.

Dialog ini dalam rangka untuk menyelaraskan serta memiliki pandangan yang sama para pimpinan lembaga, terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Termasuk peran dan fungsi pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal peliputan pemilu.

Dalam acara dialog yang dibuka oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Pers, Totok Suryanto; Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU), Marsma Agung Sasongkojati; Kadispen AL, Marsekal Pertama I Made Wira; Kadispen AD, Brigjen K Sianturi; dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Hadir pula anggota Komnas HAM, Pramono Ubaid Tontowi; dari Komnas Perempuan, Olivia Salamessy, dan Kabag Humas Komisi Pemilihan Umum, Reni Rinjani, dan perwakilan konstituen Dewan Pers.●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

